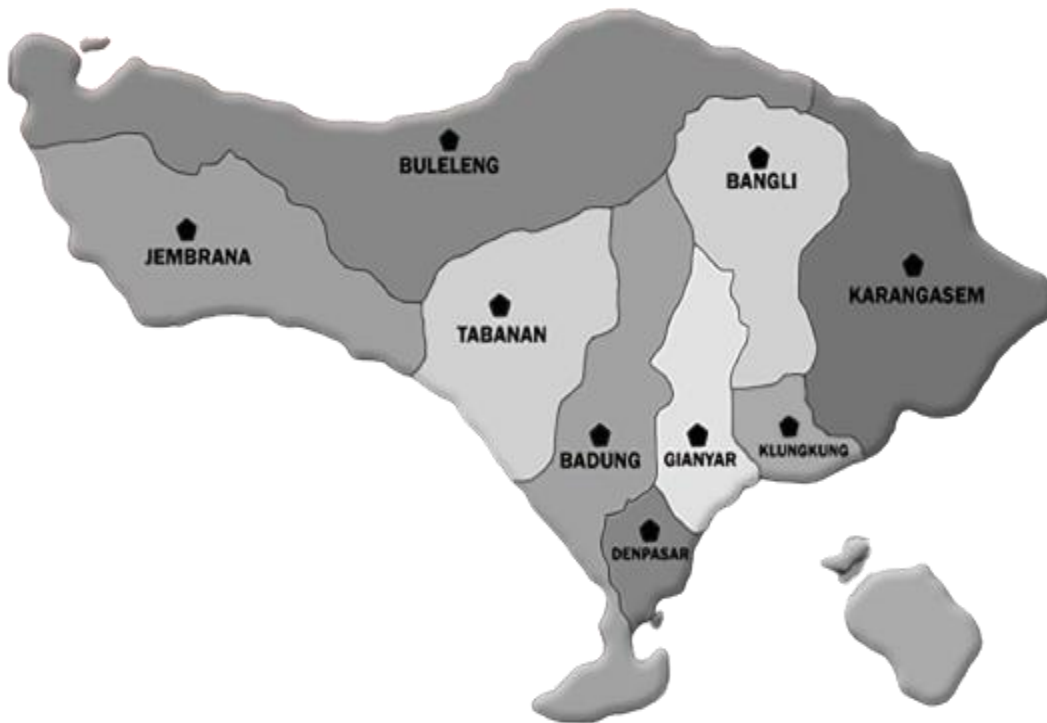


**PEDOMAN TEKNIS**  
**PELAKSANAAN *BILATERAL MEETING* TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN 2022**

## A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 telah mempedomani Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjadi jembatan antara Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Proses penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari tahapan "*Bilateral Meeting*" sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipatif (*participative*) Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat

menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

2. Prinsip Kestinambungan (*sustainable*) Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dilaksanakan.
3. Prinsip Keseluruhan (*holistic*) Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan, pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas juga mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

*Bilateral Meeting* merupakan program inovasi yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Bali sebagai langkah awal dalam rangkaian penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2023.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya *Bilateral Meeting* adalah untuk

1. Penajaman rumusan Permasalahan dalam Pembangunan Daerah Tahun 2023 dikaitkan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
2. Penajaman data Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta usulan target dan pendanaan yang akan diusulkan pada tahun 2023. Semakin jelas dan semakin terukur Perangkat Daerah dalam menyajikan data evaluasi dan target, maka akan mendapat prioritas pendanaan.
3. Membahas keselarasan pencapaian indikator Perangkat Daerah dengan merujuk pada Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan Renstra Perangkat Daerah.
4. Membahas Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 memperhatikan aspek tematik, holistik (menyeluruh), Integrasi (terpadu) dan spasial untuk memperjelas arah lokasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah, sehingga mempermudah sinergitas penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Kabupaten/Kota se-Bali dan memperjelas keselarasan arah usulan pendanaan Kabupaten/Kota se-Bali ke Provinsi.
5. Penentuan skala prioritas anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan kedalam 3 Kriteria yaitu:
  - a. *Fixed Cost* yaitu Anggaran Wajib Perangkat Daerah untuk anggaran Gaji dan Tunjangan PNS serta Gaji Tenaga Kontrak, operasional rutin dan wajib seperti listrik, air telpon, dan pemeliharaan kendaraan dinas
  - b. Belanja Penunjang (Anggaran untuk rehab Gedung, pengadaan Komputer/Laptop)
  - c. Belanja Prioritas (Anggaran untuk mendukung program unggulan perangkat daerah diluar tenaga kontrak)

### **C. Mekanisme Pelaksanaan**

*Bilateral meeting* dilakukan dengan pola *desk* dialog interaktif, dimana peserta akan dibagi per kelompok yang terdiri dari unsur:

1. Penyaji :

- a. Perangkat Daerah, sesuai pembagian jadwal
- b. Instansi terkait

2. Pembahas :

Koordinator :

- a. Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali
- b. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Bali.
- c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bali.
- d. Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Provinsi Bali.

Teknis :

- a. Para Sub Koordinator Unit Substansi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Bali.
- b. Para Sub Koordinator Unit Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bali.
- c. Para Sub Koordinator Unit Substansi Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Provinsi Bali.
- d. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali

### **D. Output Pelaksanaan**

1. Tersusunnya Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dikaitkan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, untuk mendukung Bab II RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.
2. Tersusunnya Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta usulan target dan pendanaan serta lokasi yang akan diusulkan pada tahun 2023 yang mengacu pada penuntasan target akhir tahun Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Tabel 7.2).



KETIGA : Skala Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penentuan pagu anggaran sebagaimana tabel berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	GAJI DAN TUNJANGAN (ASN)	GAJI DAN THR TENAGA KONTRAK	KESEKRE-TARIATAN (Fixed Cost)	KESEKRE-TARIATAN (Penunjang)	BELANJA PRIORITAS	TOTAL
1							

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagai bahan Perumusan Rancangan Awal RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.

Penyaji,

Pembahas,

(Pejabat Perangkat Daerah)

(Pejabat Bappeda Provinsi Bali)

Pangkat

Pangkat

NIP.

NIP.

## E. Susunan Acara

### Susunan Acara *Bilateral Meeting* Tahun 2022

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
<b>Hari/Tanggal : Senin, 7 Pebruari 2022</b>			
1	08:00 - 08:30 <b>Meeting ID: 990 4849 3962 Password: rkpd</b>	Pengarahan Kepala Bappeda Provinsi Bali	Seluruh Kelompok Ahli Pembangunan, Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Bappeda serta seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali
2	08:30 - 09:00	PERSIAPAN PESERTA JOIN PADA MASING-MASING MEETING ID	
3	09:00 - 12:00 <b>Meeting ID: 990 4849 3962 Password: rkpd</b>	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Prasarana Pekerjaan Umum:  1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	1. Ir. Ketut Dharmawahana 2. Ir. Putu Dana Pariawan Salain, M.Sc. MIHT. 3. Ir. Made Arca Eriawan, MM. 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5. Sub Koordinator Unit Substansi Prasarana Pekerjaan Umum 6. Ir. I Made Sudiarsa, M.Si. 7. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
4	09:00 - 12:00 <b>Meeting ID: 928 2336 8030 Password: rkpd</b>	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Bidang Ekonomi:  1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	1. Ketua KADIN Bali 2. Ketua GPEI Bali 3. I Ketut Jaman, SS., M.Si. 4. Cipto Aji Gunawan 5. Sugeng Pramono, SE., S.Par 6. Prof. Dr. Ir. I Gde Pitana, M.Sc. 7. Drs. I Ketut Sumarta 8. Drs. I Wayan Mudana Budha, M.Si. 9. I Gusti Ngurah Rai



NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
			<p>Suryawijaya, SE., MBA.  10. Dr. Gusti Kade Sutawa, SE., MM.  11. Dr. I Gede Made Sadguna, SE., MBA., DBA.  12. Ir. Ketut Puspawati, MBA.T.  13. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA  14. Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi  15. Ir. I Putu Astawa, M.M.A.  16. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali</p>
5	09:00 - 12:00 <b>Meeting ID:</b> <b>921 1282 7288</b> <b>Password: rkpd</b>	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Kesejahteraan Sosial:  1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Dinas Kebudayaan	1. Drs. Gede Nala Antara, M.Hum 2. Dr. Eng. Ir. Wayan Kastawan, ST., MA. 3. Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn. 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Sub Koordinator Unit Substansi Kesejahteraan Sosial 6. Titik Rusmiyati, S.Sos. 7. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
6	12:00 - 12:30	ISTIRAHAT	
7	12:30 - 14:00 <b>Meeting ID:</b> <b>990 4849 3962</b> <b>Password: rkpd</b>	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Prasarana Perhubungan dan	1. Ir. Ketut Dharmawahana 2. Ir. Putu Dana Pariawan Salain, M.Sc. MIHT. 3. Ir. Made Arca Eriawan, MM. 4. Kepala Bidang Infrastruktur

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
		Komunikasi Informasi: 1. Dinas Perhubungan	dan Kewilayahan 5. Kepala Sub Koordinator Unit Substansi Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi 6. Ir. I Made Sudiarsa, M.Si. 7. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
8	14:15 - 15:30 <b>Meeting ID:            990 4849 3962            Password: rkpd</b>	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi: 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Ketua STIKOM Bali 2. Prof. Dr. I Ketut Gede Dharma Putra, S.Kom. 3. I Putu Putra Jaya Wardana, SE., MT. 4. I Wayan Juniarta 5. Drs. I Made Nariana 6. I Dewa Made Krishna Muku, ST., MT. 7. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 8. Sub Koordinator Unit Substansi Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi 8. I Putu Wira Utama, S.Si., M.Si. 9. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
9	12:30 - 15:30 <b>Meeting ID:            928 2336 8030            Password: rkpd</b>	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi SDA: 1. Badan Riset dan Inovasi Daerah 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Rektor Universitas Hindu Indonesia 2. Prof Dr. drh. I Made Damriyasa, MS. 3. Prof. Dr. Ir. I Wayan Supartha, MS. 4. Dr. Ir. I Ketut Sudiarta, M.Si. 5. Prof.Ir. I Made Supartha Utama, MS., Ph.D. 6. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA 7. Sub Koordinator Unit

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
			Substansi SDA 8. Ir. I Putu Astawa, M.M.A. 9. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
10	12:30 - 15:30 <b>Meeting ID:</b> <b>921 1282 7288</b> <b>Password: rkpd</b>	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Pembangunan Manusia:  1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Ketua MICE Bali 2. Prof. Dr. I Nyoman Suidana, M.Pd. 3. Ir. Tjokorda Bagus Oka Ph.D. 4. Prof. Ir. Ida Ayu Dwi Giriantari, MEngSc., PhD. 5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 6. Sub Koordinator Unit Substansi Pembangunan Manusia 7. Nyoman Mangku Artini, SE., MM. 8. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
<b>Hari/Tanggal : Selasa, 8 Pebruari 2022</b>			
1	09:00 - 12:00 <b>Meeting ID:</b> <b>990 4849 3962</b> <b>Password: rkpd</b>	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah:  1. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Ir. Putu Dana Pariawan Salain, M.Sc. MIHT. 2. Ir. Made Arca Eriawan, MM 3. I Gede Sudiarta, S.Sos., M.Si. 4. Prof. Ir. Made Suidana Mahendra, MappSc., PhD,C.IEA. 5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 6. Sub Koordinator Unit Substansi Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah 7. Titik Rusmiyati, S.Sos. 8. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
2	09:00 - 12:00 <b>Meeting ID:</b> <b>928 2336 8030</b> <b>Password: rkpd</b>	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Keuangan dan Investasi:  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Pendapatan Daerah	1. Pimpinan Nusa Bali 2. Dr. I Gede Made Sadguna, SE., MBA., DBA. 3. Ir. Ketut Puspawati, MBA.T. 4. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA 5. Sub Koordinator Unit Substansi Keuangan dan Investasi 6. Dewa Ayu Citra Febriani, S.STP., M.AP. 7. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
3	09:00 - 12:00 <b>Meeting ID:</b> <b>921 1282 7288</b> <b>Password: rkpd</b>	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Pemerintahan:  1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Biro Umum dan Protokol 3. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian 4. Biro Hukum 5. Biro Organisasi 6. Sekretariat DPRD	1. Ketut Sugiasa, SH., M.Si. 2. Brigjen Pol (Purn) Dewa Made Parsana 3. Dr. I Made Suwandi 4. Made Arimbawa, SH., MM 5. Dr. A. A. Gede Oka Wisnu Murti, M.Si. 6. Drs. I Made Artadana, M.Si. 7. Adenan, SE. 8. I Dewa Nyoman Rai, SH. 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 10. Sub Koordinator Unit Substansi Pemerintahan 11. Nyoman Mangku Artini, SE., MM. 12. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
4	12:00 - 12:30	ISHOMA	

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
5	12:30 - 15:30 <b>Meeting ID:</b> <b>921 1282 7288</b> <b>Password: rkpd</b>	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Pemerintahan:  1. Badan Penghubung 2. Inspektorat 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Satuan Polisi Pamong Praja	1. Ketut Sugiasa, SH., M.Si. 2. Brigjen Pol (Purn) Dewa Made Parsana 3. Dr. I Made Suwandi 4. Made Arimbawa, SH., MM 5. Dr. A. A. Gede Oka Wisnu Murti, M.Si. 6. Drs. I Made Artadana, M.Si. 7. Adenan, SE. 8. I Dewa Nyoman Rai, SH. 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 10. Sub Koordinator Unit Substansi Pemerintahan 11. I Putu Wira Utama, S.Si., M.Si. 12. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali